

## Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang

Fernando Nugroho <sup>1)</sup>; Yulius Yohanes <sup>2)</sup>; Arifin <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Master's Program in Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak

Email: <sup>1)</sup> [e2072231073@student.untan.ac.id](mailto:e2072231073@student.untan.ac.id) ;<sup>2)</sup> [yulius.yohanes@fisip.untan.ac.id](mailto:yulius.yohanes@fisip.untan.ac.id)

<sup>3)</sup> [arifin@fisip.untan.ac.id](mailto:arifin@fisip.untan.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Received [22 Agustus 2025]

Revised [02 Oktober 2025]

Accepted [04 Oktober 2025]

### KEYWORDS

Performance, Measurement, Asset Utilization.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Sintang terhadap pengelolaan barang inventaris kantor yaitu berupa: terbatasnya sumber daya manusia pengelola aset daerah pada unit kerja baik segi kuantitas maupun kualitas sehingga berpengaruh dalam pengelolaan aset daerah. Penelitian mengenai Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggambarkan fakta-fakta yang didapat dalam penelitian sesuai dengan apa adanya. Sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, penulis mengambil dari pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang khususnya pada Bidang Aset yang terdiri dari 3 seksi yaitu : 1) Seksi pembinaan dan perencanaan, 2) Seksi penatausahaan dan penghapusan, dan 3) Seksi pengendalian dan investasi daerah.. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif Dengan tujuan penelitian ini: 1) Untuk mengukur pengelolaan aset di Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, dan 2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bidang Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang. Dari hasil penelitian ini terdapat lemahnya kinerja BPKAD Kabupaten Sintang yang tidak hanya menyebabkan terlantarnya aset-aset yang dimiliki pemerintah daerah namun lebih dari itu seringkali hal tersebut justru membebani anggaran dan juga menyebabkan pemborosan anggaran. Ini ditunjukkan dengan sering terjadinya pengadaan barang inventaris yang dilakukan secara berulang-ulang yang akan mengakibatkan penggunaan barang inventaris digunakan secara tidak maksimal. Administrasi laporan hasil pemeliharaan barang aset daerah dari setiap unit kerja Pemda yang diberikan kewenangan untuk mendukung pengelolaan aset daerah belum dapat dilaksanakan secara maksimal terkait dengan kesulitan terhadap data inventaris aset yang tidak pailit Disamping faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai BPKAD dalam pengelolaan aset.

### ABSTRACT

*Performance On Duty Monetary Management Earnings And Asset (BPKAD) of Local Government of Regency Sintang to management of office inventory that is in the form of: the limited human resource / of organizer of area asset of at good job unit of facet of amount and also quality so that have an effect on in management of area asset Research of concerning Performance On Duty Monetary Management Earnings and Asset of Local Government of At Regency Sintang using descriptive research type by depicting fact got in research as according to what the existence of. As information source in writer take away from the officer On Duty Monetary Management Earnings and Asset of Regency Sintang specially at Asset Area consisted of by 3 section that is 1) section of Construction and planning 2) Sexy [of] penatausahaan and abolition, and 3) section of Operation and area invesment.. Data-Processing qualitative With an eye to this research 1) To measure the management of asset of Asset Area [of] [at] On Duty Monetary Management Earnings and Asset of Regency Sintang, and 2) To analyse the factors influencing performance of Asset Area of At On Duty Monetary Management Earnings and Asset of Regency Sintang From this research result there are its his weak is performance of BPKAD of Regency Sintang which do not only cause unemployed of asset owned by the local government but more than that oftentimes that matter exactly encumber the budget as well as causing budget extravagance. This is shown often the happening of inventory levying by repeatedly to result the inventory use used in is not maximal. Report administration of result of conservancy of goods of area asset from each;every unit work the Local government given by kewenangan to support the management of area asset not yet enforceable maximally is related/relevant with the difficulty to data of asset inventories which bankrupt do not From other side the factor influencing performance of officer BPKAD in management.*

### PENDAHULUAN

Di dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di Indonesia saat ini, aparat pemerintah dituntut lebih responsif dan inovatif. Tuntutan tersebut berupa kemampuannya dalam pembuatan kebijakan, manajemen, organisasi dan melaksanakan nilai moral dan etika agar mereka berhasil melaksanakan pekerjaannya dalam menyediakan barang-barang publik atau memberikan pelayanan publik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menekankan pemberian yang luas kepada

pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan mereka, menjamin proses demokratisasi, perlindungan hak dan jaminan kehidupan lainnya, pemberian kewenangan di dalam undang-undang tersebut berdasarkan pada tuntutan akuntabilitas publik yaitu tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang seharusnya dilayani. Dalam upaya melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin. Tujuannya agar organisasi berjalan sesuai dengan sasaran yaitu dapat tercapainya pelayanan publik dan kepuasan yang optimal. Sebagai organisasi perangkat daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang dalam rangka pengelolaan barang-barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan tujuan peraturan ini adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar terwujudnya akuntabilitas barang milik daerah sehingga menjadi efektif dan efisien.

Kendala yang dihadapi berkaitan dengan kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang terhadap pengelolaan barang inventaris kantor antara lain adalah masih kurang optimalnya pendayagunaan aset yang dilaksanakan oleh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang dalam pengelolaan aset daerah pada unit kerja baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas sehingga berpengaruh dalam pengelolaan aset daerah. Oleh karena itu dengan tidak optimalnya kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang akan menyebabkan tidak terinventarisirnya aset-aset yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dan seringkali dapat membebani anggaran belanja daerah, misalnya tentang kendaraan dinas, perumahan dinas, dan lain-lain. Hal ini ditunjukkan dengan sering terjadinya pengadaan barang inventaris yang dilakukan secara berulang-ulang yang akan mengakibatkan penggunaan barang inventaris digunakan secara tidak maksimal. Di samping itu penyebab tidak efektif dan efisiennya adalah kebijakan pimpinan yang kurang konsisten dan tidak terencana secara baik, sehingga para aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang tidak dapat menjalankan pengelolaan terhadap pemeliharaan aset dengan baik.

## LANDASAN TEORI

Agus Dharma (2004, 52) mengatakan hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kuantitas, yaitu salah satu cara untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja pegawai dapat dilihat dari sejumlah mana pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang baik.
2. Kualitas, yaitu jumlah atau banyaknya pekerjaan yang dihasilkan pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan.
3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang telah ditentukan.

## METODE PENELITIAN

### Metode Analisis

Penulisan mengenai Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang menggunakan jenis penulisan deskriptif dengan menggambarkan fakta-fakta yang didapat dalam penulisan sesuai dengan apa adanya. Pilihan terhadap jenis penulisan deskriptif ini dimaksudkan agar dapat dikumpulkan data/ informasi tentang situasi dan kondisi terakhir berdasarkan fakta secara akurat. Penulisan deskriptif adalah untuk mencari fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk mencari gambaran yang sistematis disertai fakta yang akurat tentang kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan pendayagunaan aset pemerintah daerah di Kabupaten Sintang.

Lokasi dimana penulisan ini dilaksanakan adalah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, khususnya Bidang Aset, yang merupakan unit kerja pendukung utama bagi kegiatan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang utamanya dalam memberikan pelayanan perlengkapan dan pengelolaan aset pemerintah daerah. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan:

1. bahwa lembaga ini sangat strategis dalam mendukung dan merumuskan kebijakan perencanaan perlengkapan dan pengelolaan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
2. bahwa pelayanan yang diberikan kepada lembaga di lingkungan Pemda dan masyarakat menuntut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selalu mengedepankan akuntabilitas kerjanya.

3. bahwa dalam mengelola aset Pemda selalu dilakukan dengan cara dan prinsip yang sesuai dengan manajemen aset.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang dalam mengelola aset pemerintah daerah telah menunjukkan struktur pengelolaan yang sistematis dengan pembagian tugas yang jelas antara seksi pembinaan dan perencanaan, seksi penatausahaan dan penghapusan, serta implementasi sistem inventaris yang komprehensif menggunakan Buku Induk Inventaris (BII), Buku Inventaris (BI), Kartu Inventaris Barang (KIB), dan Kartu Inventaris Ruang (KIR), namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam aspek koordinasi kerja dan efektivitas sosialisasi peraturan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun BPKAD telah memiliki mekanisme pendayagunaan aset yang menguntungkan melalui pinjam pakai dan penyewaan kepada BUMN/BUMD, koperasi, dan yayasan dengan hasil penyewaan menjadi penerimaan daerah, serta didukung oleh faktor pendukung berupa kepercayaan, budaya organisasi yang berorientasi kebersamaan, dan motivasi tinggi pegawai, pengelolaan barang daerah masih belum mencapai dayaguna dan hasil guna yang maksimal karena kurangnya kesamaan persepsi dan interpretasi terhadap peraturan yang berlaku. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan aset daerah tidak hanya bergantung pada aspek struktural dan administratif, tetapi juga pada intensitas sosialisasi petunjuk teknis seperti HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan) dan HSU (Harga Satuan Umum), koordinasi kerja yang optimal antar instansi, serta pemahaman yang seragam dari seluruh stakeholder terhadap regulasi pengelolaan aset daerah sebagai instrumen pencapaian good government dan tertib administrasi.

### Pembahasan

#### Kuantitas Kinerja Dalam Pengelolaan Aset

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, karena dapat digunakan sebagai standar keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara terarah dan sistematis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi pembinaan dan perencanaan, hal inilah yang menyulitkan untuk menilai kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pengelolaan aset daerah secara keseluruhan, sehingga pada akhirnya pengukuran kinerja tersebut hanya dilihat dari seberapa besar hak, tugas, dan fungsi serta wewenang yang telah dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan hak dan wewenang yang dimiliki lembaga tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara dengan seksi penatausahaan dan penghapusan, pemeliharaan barang diatur sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Alat-alat Kantor dilaksanakan oleh : a) Kepala Unit / Kepala Satuan Kerja bersangkutan sebagai pemakai mengusulkan pemeliharaan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). b) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan pengecekan fisik, administrasi serta penggunaannya terhadap usul tersebut untuk diteruskan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. c) Pelaksanaan pemeliharaan dan Perawatan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan anggaran yang tersedia dan ketentuan yang berlaku.
2. Pemeliharaan Alat Angkut, kendaraan dan alat-alat besar dilaksanakan dengan cara : a) Kepala Unit/Kepala Satuan Kerja Daerah bersangkutan sebagai pemakai mengusulkan perbaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). b) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan pengecekan fisik dan penggunaannya terhadap usul tersebut. c) Pelaksanaan pemeliharaan dan Perawatan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/Unit dengan anggaran yang tersedia. d) Setiap perbaikan kendaraan, administrasi perbaikan harus dikompilasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pemeliharaan gedung, bangunan, jalan/ jembatan, monument, benda sejarah dan tanah dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: a) Kepala unit/ Kepala Satuan Kerja Daerah bersangkutan sebagai pemakai/ penanggung jawab mengusulkan Kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). b) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan pengecekan fisik dan penggunaannya terhadap usulan tersebut. c)

Pelaksanaan dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau oleh Unit Teknis yang bersangkutan tertentu lainnya dari pekerja pemeliharaan/ perbaikan dimaksud. d) Setiap proses administrasi perlu dikoordinasikan untuk setiap perbaikan gedung dan lain-lain perbaikan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. e) Pelaksanaan Pemeliharaan

dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

### **Kualitas Kinerja Dalam Pendayagunaan Aset**

Barang Daerah yang belum dimanfaatkan perlu didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani Belanja Daerah. Pinjam pakai atau peminjaman barang daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan : Barang daerah tersebut dapat dimanfaatkan secara ekonomis oleh instansi Pemerintah/Daerah dan untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Pelaksanaan Inventaris dalam usaha tertib administrasi pengelolaan milik Publik dan barang milik Daerah, dibagi dalam dua kegiatan, yaitu : Kegiatan atau pelaksanaan pencatatan, dan Kegiatan atau pelaksanaan pelaporan. Dalam pencatatan dipergunakan buku-buku dan kartu-kartu sebagai berikut, Buku Induk Inventaris (BII), Buku Inventaris (BI), Kartu Inventaris Barang (KIB), dan Kartu Inventaris Ruang (KIR). Dalam pelaksanaan pelaporan dipergunakan daftar-daftar yaitu, Daftar Rekapitulasi, dan Daftar Mutasi Barang.

### **Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Kinerja Badan Pengelolaan Aset**

#### **Faktor Pendukung**

##### **Kepercayaan**

Kepercayaan adalah orang yang dipercaya sehingga diserahkan suatu mandat dengan harapan dan keyakinan bahwa yang diserahkan mandat tersebut dalam bentuk apapun dapat dipercaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang, dapat diketahui bahwa untuk mensukseskan program kerja harus melibatkan unsur kepercayaan kepada pegawai. Hal ini sangat berkaitan dengan keterlibatan pegawai yang merupakan unsur penting manajemen yang paling utama.

Rasa percaya diri menurut Kepala Bidang Aset, dipengaruhi situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Rasa percaya diri tidak akan muncul jika terjadi tekanan dan sikap otoriter dari pimpinan kepala Dinas. Oleh karena itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selayaknya menempatkan diri sebagai orang tua yang arif bijaksana, dan bukan sebagai eksekutor yang akan memberikan sanksi-sanksi pada terdakwa.

##### **Budaya Organisasi**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang mengungkapkan bahwa setiap program kerja yang direncanakan cenderung berorientasi budaya. Hal ini dimaksudkan untuk menarik simpati pegawai dan pembinaan pada pegawai, sehingga secara moral pelaksanaan kegiatannya akan mendapat dukungan. Pada sisi lain, perlunya memahami aspek budaya organisasi sebagai sikap peduli terhadap program yang akan dicapai dalam kegiatan pengelolaan aset daerah.

Adapun kebersamaan dalam organisasi dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu kebersamaan terhadap intern organisasi, dan kebersamaan terhadap eksteren organisasi atau pihak-pihak yang terkait (stakeholders). Kedua dimensi ini perlu dipelihara dan dikembangkan, sehingga tetap terjaga keseimbangan untuk memberikan sinergi dalam peningkatan kinerja organisasi (performance organization).

##### **Motivasi**

Penjelasan yang diberikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam wawancaranya dapat diketahui bahwa pegawai yang ada cenderung mempunyai motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan tugasnya. Hal ini terlihat dari hasil kerja yang ditunjukkan oleh para pegawai (data terlampir), yaitu setiap pekerjaan selalu terselesaikan. Motivasi pegawai sangat relatif, bagi mereka yang kurang memahami tugasnya dapat terlihat kurang bergairah dalam bekerja.

Motivasi tidak perlu dipandang dari bidang pekerjaan, demikian pula bidang pekerjaan bukan menjadi ukuran mendapatkan motivasi. Akan tetapi perlu disadari kedua aspek tersebut saling membutuhkan dan mempengaruhi, sehingga hanya pikiran yang sehat dan rasionallah dapat memilahnya secara satu kesatuan. Kenyataan ini sesungguhnya kurang disadari oleh pegawai / staf.

##### **Faktor Penghambat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini adanya ketidak mampuan pegawai dalam menjalankan fungsi koordinasi tersebut, juga dipengaruhi faktor kebiasaan yang sangat mendominasi mengapa kemampuan pegawai tidak standard. Pada sisi lain perlu adanya ketegasan dari kepala langsung seperti Ketua/Kabag untuk menumbuhkan kerjasama antara pegawai supaya tidak terjadi stagnasi dalam merespon berbagai tugas dan pekerjaan yang harus dikerjakan, seperti adanya instansi yang tidak memberikan hasil laporan terhadap barang/asset daerah yang dipergunakan oleh

instansi yang bersangkutan (seperti sewa gedung) mobil dll. Dengan mendapatkan porsi pekerjaan yang jelas dari kepala dapat diketahui bagaimana sikap masing-masing pegawai. Akan tetapi kepala tersebut lebih dahulu mengetahui secara jelas mengenai pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pegawainya. Jika kepala tidak mengetahui dengan jelas sangat mungkin untuk menjelaskan atau memberi pengarahan secara tepat terhadap pegawainya. Oleh karena itu setiap kepala perlu meningkatkan kemampuannya agar dapat membimbing pegawainya kearah yang dikehendaki lembaga.

### **Sosialisasi**

Untuk memenuhi harapan dan kebutuhan yang tepat dalam pengelolaan aset daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang perlu adanya sosialisasi karena dengan sosialisasi terhadap petunjuk teknis dalam pengelolaan aset daerah semua instansi yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang dapat diatasi. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Kabag Pemeliharaan dan Pendayagunaan, masih ada instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang yang belum memahami atau tidak tahu cara pengisian pengaturan kinerja kegiatan khususnya pada program penyusunan kebutuhan dan penertiban harga satuan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang seperti HSPK (Harga Satuan Pkok Kegiatan) HSU (Harga Satuan Umum) dan lain sebagainya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Daerah dalam pengelolaan Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Khususnya di bidang pemeliharaan dan pendayagunaan Asset, maka dapatlah penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan yang sedemikian luas kepada Pemerintah Daerah, termasuk dalam hal pengelolaan asset/barang daerah. Berpedoman kepada TUPOKSI yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Daerah No.17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi tujuan harapan lembaga dalam upaya menjadikan pengelolaan Barang Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan. sehingga aset daerah dapat menunjang optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah yang professional.
2. Pendayagunaan aset yang dilakukan pada bidang aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang belum optimal dalam melakukan penyusunan dan penghipunan seluruh laporan mutasi barang secara periodik dan daftar mutasi barang setiap tahun anggaran dari semua unit atau satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kepemilikannya, sehingga kinerja bidang pemeliharaan dan pendayagunaan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pendayagunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Sintang.
3. Faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur BPKAD Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan pendayagunaan aset, ada beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi pengelolaan aset yang antara lain; kepercayaan, kinerja / Sumber Daya Manusia (SDM), budaya organisasi, kewenangan dan motivasi yang dapat mempengaruhi terhadap tugas dan fungsi dan tanggung jawab organisasi. Disamping itu pelimpahan wewenang merupakan upaya untuk menyelesaikan pekerjaan secara bertanggung jawab terhadap tugas yang akan dilaksanakan atas kebutuhan dengan mengacu pada kemampuan pegawai, disamping itu faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur BPKAD Kabupaten Sintang yang antara lain koordinasi yang lemah dengan instansi yang ada di Pemda Kabupaten Sintang serta faktor sosialisasi yang juga kurang dilakukan sehingga dapat menghambat pengelolaan aset di Kabupaten Sintang.

### **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas, dapat penulis sarankan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset (BPKAD) khususnya di bidang aset, dengan saran-saran sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan BPKAD khususnya bidang pendayagunaan aset diperlukan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai untuk menangani pengelolaan aset daerah diperlukan pembinaan secara berkesinambungan oleh Kepala Dinas dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang sesuai dengan tujuan organisasi.

2. Diperlukan suatu koordinasi yang baik untuk dapat menunjang suatu tujuan organisasi sehingga pengelolaan aset daerah yang diharapkan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Disamping itu dengan koordinasi yang baik diantara unit dan instansi yang ada di Kabupaten Sintang dapat mendorong suasana kerja yang kondusif, sehingga motivasi kerja pegawai meningkat sesuai dengan tujuan organisasi.
3. Untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab pegawai di lingkungan BPKAD diperlukan peraturan yang tegas, sehingga apa yang diharapkan organisasi dapat dicapai dan hasil pekerjaan yang dilakukan pegawai lebih baik, di samping itu perlu diadakan sosialisasi tata cara penyusunan HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan), DKBD (Daftar Kebutuhan Barang Daerah).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2001, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit BPF E.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit UPP AMP UKPN, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPF E- UGM, Yogyakarta.
- Mardiasmo, *Telaah Kritis Terhadap Kebutuhan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*. Dalam jurnal UNISA No.46/XXV/III/2002, hal. 299-322.
- Miles, Matthew B dan Huberman, A Michael. 1996. *Analisis Data Kualitatif* (diterjemahkan oleh Tjetjep al. Penerbit UI-Press, Jakarta.
- Nasucha, Chaizi. DR. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktek*. Jakarta, PT. Grasindo.
- Ruki, S. Achmad. 2001, *Sistem Manajemen Kinerja: Panduan Praktis Untuk Merancang dan Meraih Kinerja Prima*. Jakarta Penerbit PT. Gramedia.
- Sjihaduddin, A dan Arselan Harahap (eds). 2000. *Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta. PT. Pustaka LP3ES.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*, Jakarta. Penerbit PT. Grasindo..
- The Liang Gie. 1998. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta, Penerbit PT. Liberty.
- Tjokrowinoto, Mpeljarto. 2001. *Borokrasi Dalam Polemik*. Penerbit Pusaka Jaya, Yogyakarta.
- Yuwono, Teguh (eds). 2001. *Manajemen Otonomi Daerah*. Semarang, Diponegoro University.
- Yuweno, Sony, Edy Sukarno, dan Muhamad Ichsan. 2002. *Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard : Menuju Organisasi Yang Berfokus pada Strategi*. Jakarta. Penerbit PT. Gramedia.
- Winardi dan Karhi Nisjar. 1998. *Manajemen Strategik*. Jakarta. Penerbit PT. Ghalia Indonesia.
- Badan Pendidikan dan Latihan Depdagri. 2006. Modul Barang Daerah. Depdagri, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri, Himpunan Materi Pendidikan dan Latihan Pengelolaan Barang Daerah di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah. Depdagri, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001. Tentang Aset Daerah. Jakarta
- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 162 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Barang Daerah. Pontianak 2005. Pemda Propinsi Kalimantan Barat
- Banungin, Burhan. 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosaofis dan Metodologis Ke arah Penguasaan Model Aplikasi*. Penerbit PT. Rajawali, Jakarta.
- , 2004, *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke aatah Ragam Varian Kontemporer*. Penerbit Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 1995. *Pengukuran Kinerja Organisasi Publik*. Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- , 2001. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. PPSK UGM, Yagyakarta.
- Keban, Yeremis T. 1998. *Kinerja Organisasi Pbuli*. Penerbit UGM Press, Yogyakarta.
- , 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Kosep, Teori dan Isu*. Penerbit Gaya Media, Yogyakarta.